

## **PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH MELALUI PENGENDALIAN INTERNAL PADA OPD PROVINSI BANTEN**

**Ahmad Hafiz Ismail**  
Universitas Padjadjaran, Bandung  
Email : ahmad22037@mail.unpad.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan gaya kepemimpinan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan pengendalian internal sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini ialah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang terdiri dari 15 unit OPD Provinsi Banten. Teknik pengambilan sampel memakai teknik *purposive sampling* pada pejabat struktural, kepala bagian keuangan serta bendahara. Metode pengumpulan data dilaksanakan lewat cara mendistribusikan kuesioner. Metode analisis yang dipakai pada penelitian ini ialah regresi linier berganda serta uji sobel test untuk menghitung variabel intervening dengan memakai aplikasi pengolah data SPSS 25. Hasil penelitian ini memperlihatkan standar akuntansi pemerintah, gaya kepemimpinan serta pengendalian internal menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada akuntabilitas keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah dan gaya kepemimpinan menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada pengendalian internal serta standar akuntansi pemerintah dan gaya kepemimpinan menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada akuntabilitas keuangan daerah lewat mediasi pengendalian internal.

**Kata Kunci** : Standar Akuntansi Pemerintah; Gaya Kepemimpinan; Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the application of government accounting standards and leadership styles on regional financial accountability with internal control as an intervening variable. This type of research is quantitative research. The population of this study is the Banten Province Regional Apparatus Organisation consisting of 15 OPD units in Banten Province. The sampling technique used purposive sampling technique on structural officials, head of finance and treasurer. The data collection method was carried out by distributing questionnaires. The analysis method used in this study is multiple linear regression and the sobel test to calculate the intervening variable using the SPSS 25 data processing application. The results of this study show that government accounting standards, leadership style and internal control have a positive and significant effect on local financial accountability, government accounting standards and leadership style have a positive and significant effect on internal control and government accounting standards and leadership style have a positive and significant effect on local financial accountability through the mediation of internal control.*

**Keywords** : Government Accounting Standards; Leadership Style; Internal Control and Regional Financial Accountability

## PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik harus memastikan akuntabilitas yang lebih baik dimana pemerintah pusat ataupun daerah harus bertanggung jawab pada keberhasilan ataupun kegagalan melaksanakan tugas organisasi untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan dipakai untuk memperlihatkan pertanggungjawaban keuangan untuk memastikan setiap orang diperlakukan secara adil dan layak (Alam et al.,2019). Laporan keuangan ini ialah satu diantara cara untuk menaikkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah (PP No.12/2019). Saat Pemerintah Indonesia mulai menerapkan otonomi daerah, mulai muncul masalah, satu diantara permasalahannya ialah kurangnya pertanggungjawaban pada pelaporan keuangan Perda. Mengacu BPK, persoalan ini muncul sebab rendahnya kuantitas serta kualitas pegawai di bidang keuangan daerah dan pengawasannya saat memakai standar akuntansi pemerintah (Setyanto,Eko.Ritchi, 2018). Maka sebabnya, beberapa bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah diperlihatkan lewat pelaporan keuangan pemerintah harus ditanggapi dengan serius baik oleh pemerintah pusat ataupun daerah (Amin and Anwar 2020). Sejak tahun 2015, pemerintah pusat ataupun daerah dituntut untuk memakai sistem pencatatan akuntansi akrual. Peralaporan keuangan pemerintah yang mempunyai kualitas memperlihatkan 4 karakteristik yang juga dikenal sebagai karakteristik kualitatif laporan keuangan. Keempat karakteristik tersebut saling berkaitan, bisa diandalkan, bisa disandingkan dan mudah dimengerti (PP No. 71/2010).

Dalam skala tantangan strategis ataupun kriteria program prioritas di Perda Provinsi Banten yang menjadi program skala prioritas ialah Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah, maka pelaporan keuangan daerah harus diurus dengan serius sebab program yang sangat prioritas. Peran Pemerintah Daerah (Perda) pada pengelolaan keuangan daerah ialah bukti pengabdian kepada masyarakat lewat penyampaian laporan keuangan mengacu standar akuntansi pemerintahan. Penelitian (Ningtyas et al.,2019) menjabarkan terkait saat aparatur Perda memakai standar akuntansi pemerintah dengan baik maka kualitas laporan keuangan Perda semakin baik juga. Kondisi itu selaras pada penelitian (Riyani and Widajantie 2022) terkait standar akuntansi pemerintahan mempunyai basis akrual menyumbang pengaruh positif pada kinerja instansi pemerintah. Kualitas pelaporan keuangan Perda juga ditetapkan kualitas pengendalian internal Perda. Sistem pengendalian intern dipakai pada organisasi

pemerintah untuk mendukung upaya yang memungkinkan program pemerintah dijalankan secara efektif serta efisien, memastikan pengelolaan keuangan pemerintah yang andal, pengelolaan aset pemerintah yang aman, serta tentu saja, mendorong kepatuhan hukum (PP No.60 Tahun 2008).

Adapun fenomena yang terjadi saat ini, masih belum efektifnya sistem pengendalian internal yang terjadi di Provinsi Banten. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz menyampaikan terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Perda ialah satu diantara misi konstitusional BPK. Mengacu audit yang dilaksanakan Komisi BPK RI Banten Tahun 2020, termasuk pelaksanaan atas action plan yang sudah dilaksanakan Pemprov Banten. Berikutnya BPK memberikan pembisa WTP. Namun demikian BPK masih ada beberapa temuan terkait kelemahan dalam pengendalian internal serta masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Banten bertanggung jawab pada penyusunan serta penyajian wajar laporan keuangan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan serta pengendalian intern yang layak. Ini memastikan terkait laporan keuangan tidak mengandung kecurangan ataupun kesalahan. BPK menyarankan kepada Gubernur Banten untuk meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengevaluasi laporan persediaan triwulanan di OPD yang dipimpinnya sebagai bagian dari berbagai masalah yang berkaitan dengan kelemahan SPI.

Gaya kepemimpinan ialah faktor yang krusial sekali terutama untuk menangani beragam isu di sektor publik dimana para pemimpin mempunyai nilai-nilai etika dan moral yang lebih tinggi yang lebih dihargai oleh pengikutnya (Aziz et al. 2015). Beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan mengenai gaya kepemimpinan pada akuntabilitas keuangan daerah mempunyai hasil penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu yang dilaksanakan (Sari 2017) memperlihatkan terkait gaya kepemimpinan tidak menyumbang pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tapi penelitian yang dilaksanakan (Agung and Gayatri., 2018) menjabarkan gaya kepemimpinan ditemukan menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada kualitas laporan keuangan Perda. Sistem yang rumit, tidak pasti serta ambigu, serta pengalaman praktis reformasi sektor publik untuk mengubah negara Indonesia memperlihatkan terkait kemajuan reformasi sangat ditetapkan kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan (Prasojo & Holidin, 2018). Selaras pada penelitian (Alam et al.,2019) menyampaikan

terkait penerapan pengendalian internal serta kualitas kepemimpinan memberikan pengaruh signifikan pada akuntabilitas di sektor publik.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Agensi

Teori utama yang mendukung penelitian ini dijabarkan lewat sudut pandang *agency theory*. Jensen dan Meckling (1976) menjabarkan interaksi keagenan seperti sebuah komitmen pada pembuatan keputusan yang sudah diberikan pada pihak pemilik (*principal*) pada pihak perusahaan ataupun (*agent*) organisasi (Jensen and Meckling 1976). Pada studi ini, pemerintah ialah *agent* yang berkewajiban menyediakan pelaporan keuangan yang mempunyai kualitas pada publik. Kualitas pelaporan keuangan Perda bisa dijadikan satu diantara indikator ukur dari pertanggungjawaban pemerintah selaku *agent* pada publik selaku *principal* (Yusriwati dan Susanti 2022).

### Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan diperlihatkan mengacu pada standar akuntansi pemerintah berlandaskan PP No. 24 Tahun 2005, lalu diganti ke PP No. 71 Tahun 2010. Standar akuntansi pemerintah ialah pedoman umum pada penyusunan serta penyajian laporan keuangan. Kesesuaian pada standar akuntansi pemerintah menggambarkan ukuran akuntabilitas pada pengelolaan keuangan negara (Mulyati et al. 2021). Karakteristik kualitatif laporan keuangan ialah standar yang harus diterapkan pada informasi untuk memungkinkan laporan keuangan menggapai tujuannya. Relevan, keandalan, bisa disandingkan, serta bisa dimengerti ialah kualitas standar laporan keuangan pemerintah, mengacu PP No. 71 Tahun 2010.

### Gaya Kepemimpinan

Pemimpin di sektor publik cenderung mempunyai karakteristik yang kuat dalam memimpin organisasi besar dengan dana yang melampaui untuk ditangani. Sebab itu, kepemilikan kharisma serta kapabilitas kepemimpinan krusial sekali untuk menggerakkan organisasi dalam menggapai tujuan akhir sebagai pengayom bangsa. Kondisi itu bisa mendorong akuntabilitas di antara para pegawai di sektor publik dalam menggapai tujuan mengabdikan pada bangsa dan bekerja untuk kesejahteraan sosial (Alam, Said, and Abd Aziz 2019).

### Pengendalian Internal

Pengendalian internal mencakup komponen berikut: penilaian risiko, lingkungan pengendalian, informasi & komunikasi, aktivitas pengendalian serta pemantauan. Untuk mengawasi semua tindakan supaya tujuan dari tindakan bisa dicapai dengan efektif, efisien, serta bisa diandalkan, serta untuk memastikan terkait peraturan serta peraturan yang ada dipatuhi. Dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif pada pemerintahan, tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah akan meningkat (Alam, Said, and Abd Aziz 2019).

### **Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Akuntabilitas keuangan daerah didefinisikan oleh lembaga administrasi negara sebagai integritas pengungkapan, keuangan, serta pematuhan pada peraturan perundang-undangan. Sasarannya ialah laporan keuangan yang memperlihatkan berapa banyak uang yang diterima, disimpan, serta dihabiskan oleh lembaga Perda. Akuntabilitas publik didefinisikan sebagai penyediaan informasi dan pengungkapan pada pihak-pihak yang bersangkutan terkait kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah (Halim, 2012). Dengan informasi dan pengungkapan ini, Perda harus bisa memberikan informasi terkait kegiatan dan kinerja keuangan yang diperlukan secara cepat, konsisten, bisa dipercaya.

### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Standar akuntansi pemerintah berarti mengikuti aturan yang ditetapkan oleh standar akuntansi pemerintah saat menyusun laporan keuangan keuangan. Mengacu Jalil (2017), penerapan peraturan akuntansi pemerintah menyumbang dampak signifikan pada akuntabilitas keuangan daerah. dengan kata lain, peraturan ini menyumbang dampak pada laporan keuangan Perda yang mempunyai kualitas optimal ataupun rendah. Penelitian yang dilaksanakan (Yaqin & Jatmiko, 2018) menemukan terkait standar akuntansi pemerintah menyumbang pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan Perda. Hasilnya memperlihatkan terkait penerapan standar akuntansi pemerintah pada pelaporan keuangan serta akuntabilitas keuangan krusial sekali sebab terkait dengan kualitas laporan keuangan serta memungkinkan untuk melihat seberapa baik aparatur Perda menjalankan pemerintahan yang adil serta kuat. Ini selaras pada penelitian sebelumnya (Meinarsih et al., 2020) yang menegaskan terkait pelaksanaan standar akuntansi pemerintah menyumbang pengaruh yang signifikan.

**H1: Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.**

**Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Kepemimpinan ialah faktor yang krusial sekali terutama untuk menangani beragam isu di sektor publik dimana para pemimpin mempunyai nilai-nilai etika dan moral yang lebih tinggi yang lebih dihargai oleh pengikutnya. Penelitian yang dilaksanakan (Aziz et al., 2015) menjabarkan kualitas kepemimpinan ditemukan menyumbang pengaruh dalam menaikkan akuntabilitas di sektor publik. (Alam et al., 2019) mengungkapkan pengembangan pemimpin yang berkelanjutan harus menjadi prioritas yang lebih tinggi, sebab secara langsung akan menyumbang pengaruh akuntabilitas sektor publik dan pemimpin perlu membimbing pengikutnya ke jalan yang benar. Ini selaras pada penelitian yang sebelumnya (Melo et al., 2020) mendefinisikan bahwa ada kaitan langsung antara kepemimpinan dan akuntabilitas, khususnya dalam mempromosikan praktik dan perilaku terbaik yang menyediakan organisasi yang lebih efektif dan efisien.

**H2: Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.**

**Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Holle (2019) menjabarkan terkait sistem pengendalian internal menyumbang pengaruh pada kualitas laporan keuangan, yakni: “Untuk menghasilkan laporan keuangan Perda diperlukan proses dan prosedur yang harus dilalui dan diatur dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur terkait sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat disumbang pengaruh baik tidaknya sistem pengendalian intern yang dipunyai Perda”. Didukung pada penelitian tardahulu yang dilaksanakan (Sari, 2017) menunjukkan bahwa pengendalian internal menyumbang pengaruh kejelasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kondisi itu sesuai kajian yang dilaksanakan (Alam et al., 2019), (Melo et al., 2020) dan (Haq and Akbar 2022) yang memperlihatkan efektivitas pengendalian internal menyumbang pengaruh positif pada laporan keuangan.

**H3: Pengendalian Internal menyumbang pengaruh positif signifikan pada Akuntabilitas Keuangan Daerah.**

**Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Pengendalian Internal**

Penelitian yang dilaksanakan (Qomah, 2021) menegaskan terkait saat sistem pengendalian internal pemerintah dijalankan, maka keandalan pelaporan keuangan, efisiensi serta efektivitas serta ketaatan pada perundang-undangan bisa terpenuhi sehingga pengelolaan keuangan daerah akan tercapai dengan baik. Laporan keuangan pemerintah harus diperlihatkan mengacu pada standar akuntansi pemerintah serta menerapkan sistem *internal control* yang cukup baik. Kualitas laporan keuangan pasti akan naik jika standar akuntansi pemerintah diterapkan dan pengelola keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami akuntansi keuangan daerah dengan baik (Holle et al.,2019).

#### **H4: Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Pengendalian Internal.**

##### **Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Pengendalian Internal**

Semua pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya memakai gaya yang berbeda-beda. Cara seorang pemimpin menyumbang pengaruh bawahannya untuk bekerja sama dan menggapai tujuan organisasi dikenal sebagai gaya kepemimpinan (Agung & Gayatri, 2018). Mengacu PP No.60/2008, pengendalian internal ialah proses penting pada upaya serta aktivitas terus menerus yang dilaksanakan pimpinan untuk menggapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal bisa rusak jika pemimpin tidak memantau dengan baik. Ini mengacu pada penelitian (Satria & Angelina Setiawan, 2020), yang menemukan terkait gaya kepemimpinan menyumbang dampak positif serta signifikan pada kinerja pengendalian internal.

#### **H5: Gaya Kepemimpinan menyumbang pengaruh positif signifikan pada Pengendalian Internal.**

##### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah lewat Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening**

Mengacu penelitian (Amin, 2020), sistem pengendalian internal pemerintah membantu mengurangi kemungkinan kesalahan dan melindungi perusahaan dari kecurangan kontrol internal. Ini dilaksanakan untuk memastikan terkait pelaku akuntansi mematuhi peraturan serta standar yang telah ditetapkan sepanjang periode pengelolaan keuangan. Sistem pengendalian internal pemerintah akan memastikan terkait standar akuntansi pemerintah diterapkan sebagaimana mestinya. Ini akan memastikan terkait akuntabilitas keuangan Perda yang tercermin dalam laporan

keuangan Perda mengacu pada persyaratan yang dipersyaratkan, yakni andal relevan, bisa dimengerti, serta bisa diperbandingkan (PP No.71/2010).

#### **H6: Pengendalian Internal memediasi pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah.**

#### **Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah lewat Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening**

Pengendalian Internal secara hukum didasarkan pada peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 (PP No.60/2008) terkait sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Dengan adanya peraturan tersebut, semua lembaga pemerintah harus menerapkan pengendalian internal, gaya kepemimpinan yang baik diperlukan untuk menggapai tujuan secara efektif dan efisien. Gaya kepemimpinan ini akan menyumbang dampak pada peningkatan akuntabilitas keuangan daerah lewat menaikkan kualitas informasi laporan keuangan Perda (Agung & Gayatri, 2018). Pengendalian internal yang tepat membantu kepemimpinan dalam operasi sehari-hari. Mengacu Alam et al. (2019), penerapan sistem pengendalian internal pemerintah meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas serta efisiensi, serta kepatuhan pada perundang-undangan. Ini memperlihatkan terkait pengelolaan keuangan daerah bisa dilaksanakan dengan efektif.

#### **H7: Pengendalian Internal memediasi pengaruh Gaya Kepemimpinan dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah.**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menganalisis data dari 15 unit OPD Provinsi Banten dan pengumpulan data dilaksanakan sepanjang bulan Januari hingga bulan Februari 2022. Metode analisisnya memakai regresi linear berganda. Teknik penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dan data dikumpulkan lewat kuesioner dan data diuji dengan uji validitas, reabilitas serta uji asumsi klasik serta uji sobel test untuk menghitung pengaruh tidak langsung dari variabel bebas pada variabel terikat lewat variabel intervening. Penelitian ini memakai teknik pengambilan sampel dilaksanakan lewat memakai purposive sampling lewat kriteria: a. Responden pada penelitian ini yakni Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dan Pejabat Esselon III (Pejabat Penatausahaan Keuangan/Sekretaris), Pejabat Esselon IV (Kasubag Keuangan ) dan juga staf pegawai bagian keuangan yang bertanggung jawab mempunyai otoritas untuk membuat keputusan mengenai laporan

keuangan serta terlibat dalam proses pengendalian internal. Variabel terikat pada penelitian ini akuntabilitas keuangan daerah diukur memakai 3 indikator, yakni : Adanya *output* serta *outcome* yang bisa diukur, kesesuaian antara pelaksanaan serta standar pelaksanaan, dan sanksi untuk kesalahan ataupun kelalaian (Dadan Solihin, 2007).

Variabel bebas pertama pada penelitian ini ialah Standar akuntansi pemerintah ialah pedoman pemerintah pada merumuskan laporan keuangan, seperti Perda pada rangka mencapai akuntabilitas & transparansi. Variabel bebas pertama ini bisa diukur oleh 4 indikator yang ada di PP No.17 Tahun 2010 yakni, relevan, keandalan, bisa dimengerti, dan bisa disandingkan. Variabel bebas kedua yakni gaya kepemimpinan, Gaya kepemimpinan ialah pendekatan yang dipakai dalam proses kepemimpinan dan ditunjukkan dalam perilaku seorang pemimpin untuk mendorong bawahan ataupun orang lain untuk bertindak mengacu pada keinginan mereka (Prasetyo, 2006). Indikator pengukuran variabel ini ialah hubungan antar pimpinan dan bawahan, efektivitas kepemimpinan, dan motivasi kepemimpinan (Agung&Gayatri, 2018).

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### Uji Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dipakai untuk mengukur sejauh apa kemampuan model untuk menjabarkan variasi variabel terikat (Ghozali,2018). Dari tabel 1 dibawah bisa dilihat terkait hasil uji koefisien determinasi pada persamaan I menjabarkan Adjusted R Square yakni 0,402 ataupun 40,2% serta sisanya yakni 59,8% disumbang pengaruh variabel yang tidak ada kaitannya dengan model penelitian, yang artinya variabel standar akuntansi pemerintah & gaya kepemimpinan (X) memberikan pengaruh yakni 40,2% pengendalian internal (Z).

Lalu bisa dilihat terkait hasil uji koefisien determinasi pada persamaan II menjabarkan Adjusted R Square yakni 0,558 ataupun 55,8% serta sisanya yakni 44,2 % disumbang pengaruh variabel yang tidak ada kaitannya dengan model penelitian, yang artinya variabel standar akuntansi pemerintah dan gaya kepemimpinan (X) serta pengendalian internal (Z) memberikan pengaruh yakni 55,8 % terhadap variabel terikat (AKD).

### Uji Simultan (Uji F)

Mengacu Ghozali (2018), uji simultan (uji F) dipakai untuk menentukan tingkat signifikan pengaruh variabel bebas pada variabel terikat secara bebarengan. Hasil uji F ialah yakni:

Dari tabel 3 dibawah bisa dilihat terkait F hitung yakni 40,971. Nilai F hitung melampaui jika dibandingkan pada F tabel yakni 3,07. Mengacu hasil tersebut bisa ditegaskan terkait variabel bebas standar akuntansi pemerintah dan gaya kepemimpinan bisa menjabarkan variabel intervening. Kondisi itu juga memperlihatkan terkait model yang dibuat sudah baik.

Dari tabel 4 dibawah bisa dilihat terkait F hitung yakni 51,084. Nilai F hitung melampaui jika dibandingkan pada F tabel yakni 2,68. Mengacu hasil tersebut bisa ditegaskan terkait variabel bebas standar akuntansi pemerintah, gaya kepemimpinan, serta variabel intervening yakni pengendalian internal bisa menjabarkan variabel terikat akuntabilitas keuangan daerah, kondisi itu juga memperlihatkan terkait model yang dibuat sudah benar.

#### **Uji Parsial (Uji t)**

Uji t dipakai untuk mengetahui sejauh apa pengaruh variabel bebas secara individu untuk menggambarkan variasi variabel terikat (Ghozali,2018). Hipotesis diterima bila nilai signifikansi  $< \alpha = 0,05$  serta t hitung dibandingkan pada t tabel. Bila t hitung melampaui dari t tabel, maka  $H_a$  diterima, memperlihatkan terkait variabel bebas menyumbang pengaruh variabel terikat secara khusus.

Tabel 5 dibawah memperlihatkan nilai t hitung variabel standar akuntansi pemerintah (X1) yakni 8,125 dengan signifikansi 0,000 serta gaya kepemimpinan (X2) yakni 3,034 dengan signifikansi 0,003. Dari nilai terkait terlihat nilai t hitung melampaui dari nilai t tabel 1,65798 sedangkan nilai signifikansi yakni 0,000 serta 0,003 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yang yakni 0,05.

Maka sebabnya, hipotesis 4 dan 5 diterima. Tabel 6 dibawah memperlihatkan nilai t hitung variabel standar akuntansi pemerintah (X1) yakni 4,402 dengan signifikansi 0,000 dan gaya kepemimpinan (X2) yakni 4,492 dengan signifikansi 0,000. Dari nilai terkait terlihat nilai t hitung melampaui dari nilai t tabel 1,65810 sedangkan nilai signifikansi yakni 0,000 serta 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yang yakni 0,05. Oleh sebabnya maka hipotesis 1 serta 2 diterima. Lalu t hitung variabel pengendalian internal (Z) yakni 4,685 dengan signifikansi 0,000. Dari nilai terkait terlihat nilai t hitung

melampaui dari nilai t tabel 1,65810, sedangkan nilai signifikansi yakni 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yang yakni 0,05. Oleh sebabnya maka hipotesis 3 diterima.

### Uji Sobel (Sobel Test)

Pengaruh tidak langsung ataupun mediasi diukur lewat uji sobel pada pengujian hipotesisnya (Ghozali, 2018). Untuk melakukan pengambilan keputusan dalam uji sobel ini, nilai t hitung serta t tabel dibandingkan. Jika nilai t hitung melampaui dari t tabel, maka bisa ditegaskan terkait ada pengaruh mediasi.

a) standar akuntansi pemerintah (X1) terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) lewat pengendalian internal (Z)

Diketahui  $b = 0,190$  ;  $sa = 0,042$  ;  $a = 0,335$  ;  $sb = 0,033$

$$Sab = \sqrt{b^2sa^2 + a^2sb^2 + sa^2sb^2}$$

$$Sab = 0,0137$$

$$t = \frac{ab}{sab}$$

$$t = 4,642$$

Mengacu hasil uji sobel pada mediasi sebelumnya, nilai t hitung yakni 4,642, serta nilai t tabel yakni 1,658 mengacu alpha 0,05. Oleh sebabnya, t hitung melampaui dari t tabel. Maka sebabnya hipotesis 6 diterima. Hasil tersebut bisa ditegaskan terkait variabel pengendalian internal (Z) mampu memediasi pengaruh antara variabel standar akuntansi pemerintah (X1) pada akuntabilitas keuangan daerah (Y).

b) Pengaruh gaya kepemimpinan (X2) terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) lewat pengendalian internal (Z)

Diketahui  $b = 0,236$  ;  $sa = 0,071$  ;  $a = 0,370$  ;  $sb = 0,028$

$$Sab = \sqrt{b^2sa^2 + a^2sb^2 + sa^2sb^2}$$

$$Sab = 0,0198$$

$$t = \frac{ab}{sab}$$

$$t = 4,101$$

Nilai t hitung ialah 4,101 mengacu hasil uji sobel pada mediasi sebelumnya. Di sisi lain, bisa ditegaskan terkait t hitung melampaui daripada t tabel sebab nilai t tabel diketahui yakni 1,658 mengacu alpha 0,05. Oleh sebabnya hipotesis 7 diterima. Hasil tersebut bisa ditegaskan terkait variabel pengendalian internal (Z) mampu memediasi

pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan (X2) pada akuntabilitas keuangan daerah (Y).

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mengacu penelitian mengenai akuntabilitas keuangan daerah di Organisasi Perangkat Provinsi Banten untuk mengetahui sejauh mana rencana strategi daerah Provinsi Banten berjalan mengacu pada program prioritas Provinsi Banten yakni Program Penatausahaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk mengetahui perkembangan kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan serta pengendalian kinerja ataupun pelaksanaan tugas bawahannya dengan penerapan standar akuntansi pemerintah dan gaya kepemimpinan yang bisa menyumbang pengaruh akuntabilitas keuangan daerah lewat pengendalian internal. maka diberikan kesimpulan yakni: Seorang aparatur pemerintah yang memakai standar akuntansi pemerintah, menerapkan gaya kepemimpinan yang baik dan menerapkan pengendalian internal dengan baik di Organisasi Perangkat Daerah maka akan menaikkan akuntabilitas OPD terkait serta bisa meraih opini yang optimal dari BPK.

Hasil penelitian dan kesimpulan berikut bisa dipakai sebagai rekomendasi seperti: (1) Untuk memahami topik penelitian yang ingin diteliti, disarankan supaya penelitian berikutnya memakai jumlah sampel yang lebih besar. (2) Untuk meraih data yang lebih akurat, diupayakan untuk memakai metode penelitian yang berbeda, seperti wawancara langsung dengan responden. (3) Bagi peneliti berikutnya diupayakan menambah beragam variabel yang lain yang diduga mempunyai korelasi dengan akuntabilitas keuangan daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Tut Madiguna, and . Gayatri. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Menyumbang pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem." *E-Jurnal Akuntansi* 23: 1253.
- Alam, Md Mahmudul, Jamaliah Said, and Mohamad Azizal Abd Aziz. 2019. "Role of Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices on the Accountability Practices in the Public Sectors of Malaysia." *Social Responsibility Journal* 15(7): 955–76.
- Amin, Asbi, and Anwar Anwar. 2020. "Dimensi Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah." *Jurnal Akuntansi* 10(3): 223–30.
- Aziz, Mohamad Azizal Abd, Hilmi Ab Rahman, Md. Mahmudul Alam, and Jamaliah Said. 2015. "Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study."

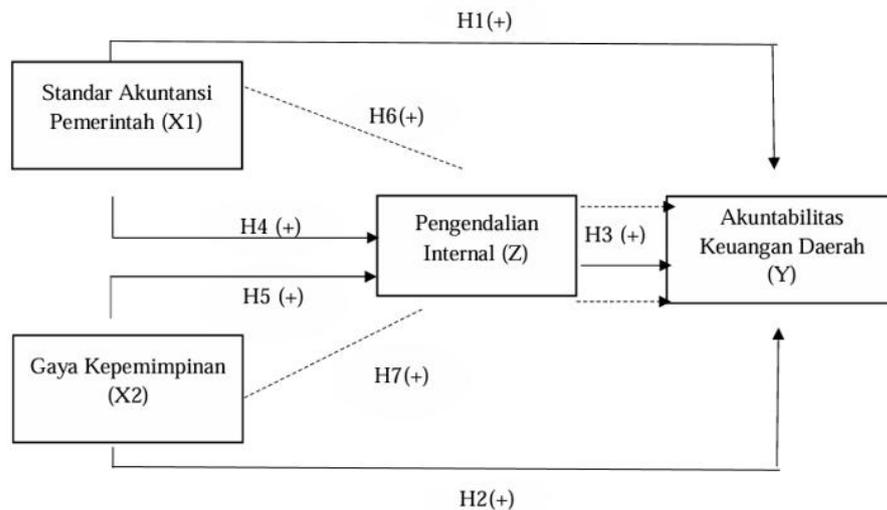
- Procedia Economics and Finance* 28(15): 163–69. [http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01096-5](http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01096-5).
- Daerah, Pemerintah. 2018. “Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA.” 9(April): 89–105.
- Haq, Rima Angelia, and Fajar Syaiful Akbar. 2022. “Determinan Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Kota Surabaya.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6(3): 789–803.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, A. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Indah Rakhma Ningtyas, Harfiahani, and Wuryan Andayani. 2019. “The Effect of Government Internal Control System And Government Accounting System on Performance Accountability With The Financial Quality Statements As Intervening Variables (Case Study: The Government of Lumajang Regency, East Java).” *International Journal of Business, Economics and Law* 5(5): 179–87.
- Jensen, Michael, and William Meckling. 2012. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure.” *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*: 283–303.
- LAN, BPKP.2000. Pengukuran kinerja instansi pemerintah. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mulyati, Sri et al. 2021. “Sri Mulyati, Ridwan Ibrahim and Muslim A. Djalil\* Magister of Accountancy Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh [Http://Doi.Org/10.35409/IJBMER.2021.3338](http://doi.org/10.35409/IJBMER.2021.3338).” *International Journal of Business Management And Economic Review* 4(06): 258–68.
- Pengawasan Internal Pemprov Banten Dinilai Lemah. Available at: <https://digdayamedia.id/pengawasan-internal-pemprov-banten-dinilai-lemah/> diakses pada 10/10/2021.
- Prasojo, E. and Holidin, D. (2018), "Leadership and Public Sector Reform in Indonesia", Berman, E. and Prasojo, E. (Ed.) *Leadership and Public Sector Reform in Asia (Public Policy and Governance, Vol. 30)*,
- Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
- Riyani, Anisa Ayu, and Tituk Diah Widajantie. 2022. “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 6(2): 477–86.
- Sari, Embun Widya. 2017. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu.” *JOMFekom* 4(1): 571–86. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah Mempunyai basis Akrua

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

YUSRIWARTI, YUSRIWARTI, and NOVRIANI SUSANTI. 2022. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Mempunyai basis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kab. Inhil)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 11(1): 34-44.

### TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan 1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,642 <sup>a</sup>	,412	,402	5,592

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan 2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,754 <sup>a</sup>	,569	,558	1,948

Tabel 3. Uji F Persamaan 1

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2562,461	2	1281,231	40,971	,000 <sup>b</sup>
	Residual	3658,739	117	31,271		
	Total	6221,200	119			

Tabel 4. Uji F Persamaan 2

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	581,394	3	193,798	51,084	,000 <sup>b</sup>
	Residual	440,073	116	3,794		
	Total	1021,467	119			

Tabel 5. Uji t Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta		t	Sig.
	B	Std Error				
1	(Constant)	24,146	3	193,798	51,084	,000 <sup>b</sup>
	SAP	,805	116	3,794		
	GK	,459	119			

Tabel 6. Uji t Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta		t	Sig.
	B	Std Error				
1	(Constant)	2,372	2,310	1,027	1,027	,307 <sup>b</sup>
	SAP	,190	,043	,338	4,402	,000
	GK	,246	,055	,286	4,492	,000